

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan pengungkapan dan *corporate governance*, berikut ini adalah penjelasan beberapa penelitian-penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaannya dengan penelitian sekarang:

1. Anggita dan Aditya (2014)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan struktur *corporate governance* yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. Penelitian ini berfokus pada laporan laba rugi komprehensif karena laporan laba rugi komprehensif merupakan laporan yang selalu diperhatikan oleh stakeholders dalam mengambil keputusan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jumlah dewan komisaris, sedangkan variabel dependen dari penelitian ini adalah pengungkapan wajib laporan laba rugi konvergensi IFRS. Pengukuran variabel dependen dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *scoring*, yaitu jika item yang perlu diungkapkan dapat diterapkan dalam perusahaan dan item tersebut diungkapkan oleh perusahaan diberi skor 1, jika item tersebut tidak diungkapkan diberi skor 0, dan jika item

tersebut tidak dapat diterapkan dalam perusahaan akan diberi tanda N/A (*Not Applicable*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur *corporate governance* yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif yaitu jumlah anggota komite audit dan jumlah rapat komite audit. Sedangkan variabel lain yaitu jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif

Persamaan dengan penelitian sekarang :

- a. Penelitian menggunakan variabel independen dewan komisaris independen dan komite audit.
- b. Lingkup penelitian adalah laporan laba rugi komprehensif.
- c. Variabel dependen penelitian adalah tingkat pengungkapan wajib.
- d. Teknik yang digunakan pada variabel dependen tingkat kepatuhan pengungkapan juga menggunakan teknik *scoring*.

Perbedaan dengan penelitian sekarang :

- a. Sampel penelitian diatas adalah perusahaan jasa dengan tahun analisis 2010-2013, sedangkan penelitian sekarang adalah perusahaan LQ 45 periode 2014/2015 dengan tahun analisis 2012-2013.
- b. Variabel dependen penelitian diatas adalah tingkat pengungkapan wajib, sedangkan penelitian sekarang adalah tingkat pengungkapan wajib dan tingkat pengungkapan sukarela.

- c. Variabel independen penelitian diatas adalah jumlah dewan komisaris, dewan komisaris independen, komite audit, rapat dewan komisaris dan rapat komite audit, sedangkan penelitian sekarang adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit, sehingga variabel independen yang berbeda adalah adanya variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.

2. Wulan Dwi Utami (2012)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dalam konvergensi *International Financial Reporting Standards* (IFRS) perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta untuk mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib tersebut. Variabel independen dari penelitian ini adalah *corporate governance* yang diproksikan oleh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit dan proporsi komisaris independen, sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS yang diproksikan oleh 4 IAS pada tahun 2009 dan 5 IAS pada tahun 2010. Item pada IAS tersebut diidentifikasi berdasarkan IFRS *Presentation and Disclosure Checklist* dari *Deloitte*. Desain variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan metode *Unweighted* dengan menggunakan teknik *scoring*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS di Indonesia masih kurang, karena pengungkapan masih kurang dari

100 persen untuk pengungkapan wajib. Terkait dengan pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan wajib, variabel independen yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional sehingga hipotesis pertama dan kedua diterima. Variabel lainnya yaitu jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, proporsi komisaris independen, *leverage*, profitabilitas dan tipe auditor tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Persamaan dengan penelitian sekarang :

- a. Variabel independen penelitian menggunakan kepemilikan institusional, manajerial dan komisaris independen.
- b. Variabel dependen penelitian adalah tingkat pengungkapan wajib.
- c. Teknik pengukuran yang digunakan pada variabel dependen tingkat kepatuhan pengungkapan menggunakan teknik *scoring* dengan *Checklist* dari Deloitte.

Perbedaan dengan penelitian sekarang :

- a. Sampel penelitian diatas adalah perusahaan manufaktur dengan tahun analisis 2009-2010, sedangkan penelitian sekarang adalah perusahaan LQ 45 periode 2014/2015 dengan tahun analisis 2012-2013.
- b. Variabel dependen penelitian diatas adalah tingkat pengungkapan wajib, sedangkan penelitian sekarang adalah tingkat pengungkapan wajib dan tingkat pengungkapan sukarela.
- c. Variabel independen penelitian diatas adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat

komite audit dan proporsi komisaris independen, sedangkan penelitian sekarang adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit, sehingga variabel independen yang berbeda adalah adanya variabel komite audit.

3. Wardani Prawinandi (2012)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi *International Financial Reporting Standard (IFRS)* pada perusahaan jasa, serta untuk mengetahui pengaruh struktur *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure tersebut. Variabel independen dari penelitian ini adalah *corporate governance* yang diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan komisaris utama, proporsi komisaris wanita dan jumlah anggota komite audit. Variabel kontrol penelitian ini adalah jumlah anggota dewan direksi profitabilitas, dan *leverage* Sedangkan variabel dependennya adalah tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* yang diukur diidentifikasi berdasarkan *IFRS Presentation and Disclosure Checklist* dari Deloitte yang dikur menggunakan teknik *scoring*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS di Indonesia masih kurang, karena pengungkapan masih kurang dari 100 persen untuk pengungkapan wajib. Sedangkan untuk struktur *corporate governance* yang mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Variabel independen yang mempengaruhi tingkat kepatuhan

mandatory disclosure konvergensi IFRS adalah proporsi komisaris independen dan jumlah anggota komite audit. Variabel independen lainnya tidak berpengaruh.

Persamaan dengan penelitian sekarang :

- a. Variabel independen penelitian menggunakan proporsi dewan komisaris independen dan komite audit.
- b. Variabel dependen penelitian adalah tingkat pengungkapan wajib.
- c. Teknik pengukuran yang digunakan pada variabel dependen tingkat kepatuhan pengungkapan menggunakan teknik scoring dengan *Checklist* dari Deloitte.

Perbedaan dengan penelitian sekarang :

- a. Sampel penelitian diatas adalah perusahaan jasa dengan tahun analisis 2009-2012, sedangkan penelitian sekarang adalah perusahaan LQ 45 periode 2014/2015 dengan tahun analisis 2012-2013.
- b. Variabel dependen penelitian diatas adalah tingkat pengungkapan wajib, sedangkan penelitian sekarang adalah tingkat pengungkapan wajib dan tingkat pengungkapan sukarela.
- c. Variabel independen penelitian diatas adalah jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan komisaris utama, proporsi komisaris wanita dan jumlah anggota komite audit, sedangkan penelitian sekarang adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit, sehingga variabel independen yang berbeda adalah adanya variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.

4. Akhtaruddin, Alam Hossain, Hossain, & Yao (2009)

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara empiris *corporate governance* terhadap pengungkapan sukarela oleh perusahaan yang terdaftar di Malaysia. Variabel independen dari penelitian ini adalah Corporate Governance yang diukur oleh ukuran Dewan komisaris, dewan komisaris independen, Kepemilikan institusional, *family control*, dan persentase komite audit. Sedangkan variabel dependen dari penelitian ini adalah tingkat pengungkapan sukarela yang diukur dengan teknik *scoring* yang mengacu pada indeks pengungkapan sukarela yang dikembangkan oleh Robert pada tahun 1995. Item – item tersebut kemudian dibandingkan dengan item-item pengungkapan wajib untuk Bursa Malaysia.

Hasil penelitian ini menemukan adanya hubungan positif antara ukuran Dewan dan dewan komisaris independen terhadap pengungkapan sukarela. Sedangkan *family control* berhubungan negatif dengan pengungkapan sukarela dan rasio komite audit tidak berhubungan dengan pengungkapan sukarela.

Persamaan dengan penelitian sekarang :

- a. Variabel independen penelitian menggunakan proporsi dewan komisaris independen dan komite audit.
- b. Variabel dependen yang digunakan adalah tingkat pengungkapan sukarela
- c. Teknik pengukuran yang digunakan pada variabel dependen tingkat pengungkapan sukarela menggunakan teknik *scoring*.

Perbedaan dengan penelitian sekarang :

- a. Sampel penelitian diatas adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia dengan tahun analisis 2002, sedangkan penelitian sekarang adalah perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014/2015 dengan tahun analisis 2012-2013.
- b. Variabel dependen penelitian diatas adalah tingkat pengungkapan sukarela, sedangkan penelitian sekarang adalah tingkat pengungkapan sukarela dan tingkat pengungkapan wajib.
- c. Variabel independen penelitian diatas adalah dewan komisaris, dewan komisaris independen, Kepemilikan institusional, *family control*, dan persentase komite audit, sedangkan penelitian sekarang adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit, sehingga variabel independen yang berbeda adalah adanya variabel tambahan kepemilikan manajerial.

5. Li dan Qi (2008)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan sukarela pada 100 perusahaan yang terdaftar di China dengan tahun sampel 2003-2005. Variabel independen dari penelitian ini adalah *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Sedangkan variabel dependen dari penelitian ini adalah tingkat pengungkapan sukarela yang diukur menggunakan sebuah sistem dengan target-target nomor untuk membandingkan target dan *object* memiliki nilai apparsial yang sama atau berbeda.

Hasil penelitian ini menemukan hubungan positif antar variabel independen terhadap dependen. Perusahaan dengan kepemilikan Manajerial yang tinggi mempunyai tingkat rata-rata pengungkapan sukarela yang tinggi. Artinya kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Selain itu kepemilikan institusional juga berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

Persamaan dengan penelitian sekarang :

- a. Variabel independen penelitian menggunakan kepemilikan institusional dan manajerial.
- b. Variabel dependen yang digunakan adalah tingkat pengungkapan sukarela.

Perbedaan dengan penelitian sekarang :

- a. Sampel penelitian diatas adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa China dengan tahun analisis 2003-2005, sedangkan penelitian sekarang adalah perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014/2015 dengan tahun analisis 2012-2013.
- b. Variabel dependen penelitian diatas adalah tingkat pengungkapan sukarela, sedangkan penelitian sekarang adalah tingkat pengungkapan sukarela dan tingkat pengungkapan wajib.
- c. Variabel independen penelitian diatas adalah kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial, sedangkan penelitian sekarang kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit, sehingga variabel independen yang berbeda adalah adanya variabel tambahan komisaris independen dan komite audit.

TABEL 2.1
RINGKASAN PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA PENELITIAN
SEKARANG DAN PENELITIAN TERDAHULU

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Alat Uji	Hasil Peneliti
1.	Anggita dan Aditya (2014)	<p><u>Variabel independen</u> <i>Corporate governance</i> yang diprosikan dengan jumlah dewan komisaris, dewan komisaris independen, komite audit, rapat dewan komisaris dan rapat komite audit.</p> <p><u>Variabel dependen</u> Tingkat pengungkapan wajib</p>	Uji Regresi berganda	<p>a. Jumlah anggota komite audit dan jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib</p> <p>b. Jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS.</p>
2.	Wulan Dwi Utami (2012)	<p><u>Variabel independen</u> <i>Corporate Governance</i> yang diprosikan oleh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit dan proporsi komisaris independen.</p> <p><u>Variabel dependen</u> Tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS</p> <p><u>Variabel Kontrol</u> <i>Leverage</i>, profitabilitas, tipe auditor</p>	Uji regresi berganda	<p>a. kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib.</p> <p>b. Jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, proporsi komisaris independen, leverage, profitabilitas dan tipe auditor tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS</p>
3.	Wardani Prawinandi (2012)	<p><u>Variabel Independen</u> Struktur <i>corporate governance</i> diprosikan dengan jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan komisaris utama, proporsi komisaris wanita, jumlah anggota komite audit.</p> <p><u>Variabel Dependen</u> Tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.</p>	Uji regresi berganda	<p>a. proporsi komisaris independen dan jumlah anggota komite audit mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS</p> <p>b. Variabel independen dan kontrol lainnya tidak berpengaruh.</p>

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Alat Uji	Hasil Penelitian
		<u>Variabel Kontrol</u> Jumlah anggota dewan direksi profitabilitas, dan <i>leverage</i> .		
4.	Akhtaruddin, Alam Hossain, Hossain, dan Yao (2009)	<u>Variabel independen</u> <i>corporate governance</i> yang diprosikan dengan ukuran dewan, komisaris independen, <i>family control</i> <u>Variabel dependen</u> tingkat pengungkapan sukarela	Uji regresi berganda	a. Dewan dan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela b. <i>family control</i> berhubungan negatif dengan pengungkapan sukarela c. Rasio komite audit tidak berhubungan dengan pengungkapan sukarela.
5.	Li dan Qi (2008)	<u>Variabel independen</u> <i>Corporate governance</i> yang diprosikan dengan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. <u>Variabel dependen</u> Tingkat pengungkapan sukarela		a. Kepemilikan Manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

Sumber : diolah

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Agency Theory

Hubungan agensi (*agency relationship*) terjadi ketika pemilik perusahaan memperkerjakan atau mengontrak agen (*agent*) yaitu manajer untuk memberikan jasanya dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepadanya (Jensen dan Meckling 1976 dalam Ndaruningpuri 2006). Delegasi wewenang tersebut menyebabkan adanya kepentingan yang berbeda antara kedua pihak. Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan potensi konflik kepentingan yang disebut *agency problem*.

Agency problem seringkali terjadi pada perusahaan berkaitan dengan kepemilikan antara manajemen dan pemegang saham. *Agency problem* tersebut dapat diminimalisir dengan dua kategori, yaitu melalui insentif dan *monitoring* (Zhou dan Panbunyuen, 2008 dalam Wulan, 2012). Insentif dan *monitoring* dapat berjalan dengan baik jika perusahaan menerapkan mekanisme *corporate governance*.

Agency theory menjelaskan pentingnya praktik pengungkapan pada laporan keuangan baik wajib maupun sukarela oleh manajemen kepada para pemegang saham maupun pihak lain yang berkepentingan (Ferry dan Diyanti, 2010). Praktik pengungkapan perlu dilakukan perusahaan melalui penyampaian laporan untuk menghindari asimetri informasi antara manajemen dengan *stakeholders* (Anggita, 2014). Pengungkapan informasi yang tinggi dapat meminimalisasi *agency problem* yang terjadi pada perusahaan.

2.2.2 Konvergensi IFRS

IFRS adalah standar akuntansi internasional yang dibuat oleh *International Accounting Standar Board (IASB)*. *International Financial Reporting Standards (IFRS)* adalah standar pelaporan akuntansi yang memberikan penekanan pada penilaian secara profesional dengan *disclosures* yang jelas dan transparan. Standar ini muncul akibat tuntutan globalisasi yang mengharuskan para pelaku bisnis di suatu negara ikut serta dalam bisnis internasional, maka diperlukan suatu standar internasional yang berlaku sama di semua negara untuk memudahkan proses membaca informasi pada laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan di berbagai negara.

Dewan standar Akuntansi Keuangan IAI mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia berpedomanan dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) sebagai referensi utamanya. IFRS memberikan manfaat dalam kemudahan perbandingan laporan keuangan secara Internasional dan meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan. Melalui konvergensi IFRS laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan Indonesia akan dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan dari negara lain, sehingga diharapkan melalui konvergensi IFRS dapat mengurangi biaya modal dan meningkatkan investasi global khususnya di negara Indonesia.

Konvergensi IFRS dideklarasikan pada tahun 2008. Deklarasi tersebut mengungkapkan bahwa pada mulai tanggal 1 Januari 2012 seluruh standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI akan berpedoman kepada IFRS dan harus diterapkan oleh seluruh entitas yang *go public*. Konvergensi IFRS di Indonesia dimulai secara bertahap sejak 2008 hingga 2011. Tahapan tersebut terdiri dari tahap adopsi pada tahun 2008 hingga tahun 2010, tahap persiapan akhir yang dilaksanakan selama tahun 2011 dan tahap pengimplementasian PSAK berbasis IFRS serta dilakukan evaluasi secara komprehensif mulai tahun 2012 (Husin, 2008 dalam Wardani, 2012). konvergensi IFRS sendiri didefinisikan sebagai sebuah proses untuk menyelaraskan standar akuntansi yang dipakai di suatu negara dengan IFRS (Chen, 2009). Konvergensi IFRS diharapkan akan memperkecil perbedaan di antara keduanya.

2.2.3 Disclosures

Suwardjono (2005 : 578) menyatakan secara konseptual pengungkapan adalah suatu bagian integral dari proses pelaporan keuangan, sedangkan secara teknis pengungkapan merupakan langkah terakhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan dari pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran.

Pengungkapan adalah penyajian informasi dari kegiatan proses akuntansi pada perusahaan dalam bentuk laporan keuangan sesuai kinerja dan fakta yang terjadi diperusahaan baik yang terkait dengan data keuangan maupun non keuangan.

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-134/BL/2006 yang mengatur mengenai laporan tahunan perusahaan yang *go public* dalam hal penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik menyatakan bahwa laporan tahunan emiten dan publik merupakan sumber informasi penting bagi pemegang saham dan *stakeholder* lainnya dalam membuat keputusan investasi. Peraturan tersebut menyatakan bahwa laporan tahunan wajib memuat ikhtisar data keuangan penting atas laporan keuangan yang telah diaudit dan memberikan informasi terkait tata kelola perusahaan seperti : laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tanggung jawab direksi atas laporan keuangan.

Tiga konsep pengungkapan yang biasanya digunakan (Imam dan Chariri, 2007 : 378), yaitu :

1. Pengungkapan cukup (*adequate*) adalah pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan.
2. Pengungkapan wajar (*fair*) adalah pengungkapan dengan tujuan etis dengan menyediakan informasi dan memberikan perlakuan yang layak dan adil bagi semua pengguna laporan keuangan.
3. Pengungkapan lengkap (*full*) adalah pengungkapan semua informasi yang dimiliki perusahaan, atau sering disebut pengungkapan yang berlebihan atau pengungkapan tidak layak karena terlalu banyak informasi yang disajikan sehingga laporan sulit dipahami oleh pembaca.

Penyajian laporan keuangan harus disertai dengan pengungkapan yang cukup (*adequate disclosure*) agar Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami dan tidak menjadikan salah interpretasi yang akan menyesatkan pemakai informasi. Artinya, informasi yang disajikan tidak berlebihan namun juga tidak kurang sehingga tidak menyesatkan yang membacanya. Laras (2009) menyatakan terdapat dua sifat pengungkapan, yaitu pengungkapan yang didasarkan pada ketentuan (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*).

Mandatory Disclosure

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum pada laporan keuangan yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku (Suwardjono, 2005 : 581). Adina dan Ion (2008) dalam Wardani (2012) mendefinisikan bahwa *mandatory disclosure* adalah informasi yang harus diungkapkan sebagai

konsekuensi dari adanya ketentuan perundang-undangan, pasar saham, komisi bursa saham atau peraturan akuntansi dari pihak yang berwenang. Definisi pengungkapan wajib dilengkapi oleh Anggita (2014) yang menyatakan pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang diharuskan oleh peraturan atau ketentuan yang berlaku seperti yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan Republik Indonesia atau oleh organisasi profesi akuntansi (Ikatan Akuntan Indonesia) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Mandatory disclosure bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan serta memahami isi dan angka-angka dalam laporan keuangan sehingga pengguna dapat memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku (Adina dan Ion, 2008 dalam Wardani, 2012). Secara umum, tujuan pengungkapan wajib adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda (Djoko dan Rena, 2011). Peneliti memberikan kesimpulan bahwa pengungkapan wajib adalah pengungkapan informasi yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku dan disahkan oleh Badan yang berwenang di sebuah Negara. Pengungkapan ini harus dipenuhi agar laporan yang dikeluarkan perusahaan memberikan informasi yang bermanfaat dan tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan

Voluntary Disclosure

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh aturan yang berlaku sehingga informasi yang diungkapkan bersifat sukarela. Perusahaan dapat memilih sendiri item-item yang akan diungkapkan dalam laporan keuangannya. Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lain yang relevan untuk pembuatan keputusan bagi para pemakai laporan tahunan. Tujuan pengungkapan informasi sukarela adalah untuk menarik perhatian investor dan membantunya memahami strategi bisnis manajemen, sehingga investor melanjutkan investasi (Healy dan Palepu, 1993 dalam Ria dan Rita, 2010).

Erna Wati (2013) menyatakan bahwa informasi yang bersifat sukarela terkait dengan lingkungan hidup dan nilai tambah dapat digunakan sebagai media penyampaian sinyal-sinyal positif kepada pengguna informasi agar pengguna informasi dapat mengetahui bahwa kondisi perusahaan dalam kondisi baik. Pengungkapan sukarela dapat menjadi cara yang efektif dalam mengatasi krisis kepercayaan publik. Perusahaan yang memiliki sumber daya manusia yang memadai memiliki dorongan untung bersaing dengan kompetitornya melalui pengungkapan sukarela.

2.2.4 Corporate Governance

(FCGI) Forum *Corporate Governance* Indonesia (2001) mendefinisikan corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan para *stakeholder* perusahaan yaitu pemegang saham, pengurus (manajer) perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan

yang lain baik internal maupun eksternal terkait dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Menurut Muh. Arief (2009: 2) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai seperangkat sistem dan kebijakan yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dengan cara mendorong terbentuknya manajemen yang bersih dan transparan.

Peneliti memberikan kesimpulan bahwa *corporate governance* adalah suatu kebijakan dan aturan yang akan menjadi sebuah kebiasaan dalam suatu perusahaan yang bertujuan untuk mengatur hubungan pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan. Melalui penerapannya akan didapat hubungan yang harmonis untuk menghasilkan laporan keuangan dengan tingkat kepatuhan pengungkapan yang tinggi dan mencegah terjadinya resiko kecurangan dan kesalahan yang mungkin dapat terjadi.

a. Konsep Dasar *Corporate Governance*

Dasar dari *corporate governance* adalah dua teori yang terkenal yaitu *stewardship theory* dan *agency theory* (Chinn,2000; Shaw,2003 dalam Nathalia, 2012). *Stewardship theory* didasarkan atas filosofi sifat manusia, yakni bahwa manusia pada hakekatnya adalah pribadi yang jujur, dapat dipercaya, berintegritas serta bertanggung jawab dalam melaksanakan peran dan tugas nya. Oleh karena itu, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam mengemban kepentingan *stakeholder*.

Sementara itu, teori yang berbeda yang dikembangkan oleh Michael Johnson yakni *agency theory*, memandang bahwa manajemen akan bertindak

sesuai dengan pikirannya demi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bertindak dengan benar demi kepentingan pemegang saham. Pada kenyataannya teori *agency* inilah yang lebih tepat mencerminkan keadaan manajemen pada saat ini. *Corporate governance* terus dikembangkan dengan dasar yang bertumpuh pada teori agensi karena lebih relevan dengan kenyataan keadaan saat ini. Terdapat dua hal yang penting dalam konsep ini, yang pertama adalah hak pemegang saham yang harus dilindungi yaitu untuk memperoleh informasi secara relevan dan reliabel dan yang kedua adalah kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara akurat, tepat waktu, dan transparan kepada *stakeholder* perusahaan.

Indonesia menganut *Two Tiers System*, sehingga perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai dua badan terpisah. Badan tersebut adalah dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (FCGI, 2001). Oleh karena itu penerapan *corporate governance* yang baik sangat dibutuhkan di Indonesia.

b. Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER – 01/MBU/2011 terdapat lima prinsip yang harus dilakukan dalam mewujudkan *corporate governance* yang baik, yaitu :

a. Keterbukaan Informasi (*Transparency*)

Transparency adalah pengungkapan informasi secara terbuka, baik dalam pengambilan keputusan maupun informasi mengenai perusahaan yang bersifat material sehingga akan didapat informasi yang relevan bagi pengguna dan tidak terjadi kesenjangan informasi untuk berbagai pihak.

b. *Accountability* (akuntabilitas)

Akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan aktivitas organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan dan otorisasi serta pemisahan kekuasaan yang baik dalam organisasi perusahaan.

c. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban diartikan sebagai kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan harus bertanggungjawab dalam beberapa aspek antara lain perpajakan, pemerintah, sosial dan lingkungan. Perusahaan harus mampu bertanggungjawab agar kegiatan operasi perusahaan dapat berjalan lancar.

d. *Independency* (kemandirian)

Kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan atau organisasi dikelola secara profesional tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan, kebijakan dan perundangan-undangan yang berlaku. Keadaan tersebut dapat dicapai dengan gaya kepemimpinan yang harus berani menolak pengaruh buruk serta intervensi dari pihak luar yang yang tidak sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

e. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

Kesetaraan dan kewajaran adalah sebuah keadaan dimana *stakeholder* diperlakukan secara adil sehingga semua hak-hak nya dipenuhi sesuai dengan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Stakeholder merupakan pihak yang penting untuk perusahaan, sehingga kepentingan dari *stakeholder* harus dijaga dan diperhatikan agar kontrak dan hukum yang telah disepakati berjalan dengan lancar.

Menurut Hamzah dan Suparjan (2009) dalam Anggita (2014) minat dunia usaha terhadap pengembangan wacana dan praktek *corporate governance* masih rendah walaupun mengetahui banyak manfaat yang dapat diperoleh melalui penerapannya. Hal ini yang menjadi penyebab permasalahan perusahaan di Indonesia. Penerapan standar akuntansi yang telah konvergen dengan IFRS tidak menjamin perusahaan mematuhi pengungkapan yang diwajibkan, sehingga diperlukan *corporate governance* sebagai suatu perangkat internal yang mengatur hubungan antar pemangku kepentingan. Terciptanya hubungan yang harmonis didalam internal perusahaan diharapkan akan mendorong adanya pengungkapan informasi yang lebih lengkap dan bermanfaat.

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham pada perusahaan oleh institusi lain seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*. Kepemilikan institusional diperoleh dari persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain, baik perusahaan dalam maupun luar negeri dan pemerintah terhadap total saham perusahaan (Barako, 2007 dalam Wulan, 2012). Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk

mengendalikan pihak manajemen perusahaan melalui proses *monitoring* dan evaluasi secara efektif sehingga akan mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib yang lebih tinggi pada laporan keuangan (Gideon, 2005).

Li dan Qi (2008) menemukan pengaruh positif atas kepemilikan institusional terhadap pengungkapan sukarela, semakin besar tingkat kepemilikan institusi lain semakin tinggi pula rata-rata pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan. Wulan (2012) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib, semakin besar prosentase kepemilikan institusional semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib yang dilakukan perusahaan. Kedua hasil penelitian tersebut telah menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap tingkat pengungkapan.

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Huafang, 2007 dalam Wulan, 2012). Semakin besar kepemilikan manajemen atas saham perusahaan diharapkan akan meningkatkan transparansi informasi perusahaan kepada *stakeholder*. Manajer yang memiliki saham perusahaan memiliki insentif dan motivasi yang lebih besar untuk memaksimalkan kinerjanya dalam perusahaan, seperti mematuhi pengungkapan wajib yang disyaratkan (Al-Fayoumi et al. 2010 dalam Wulan, 2012).

Li dan Qi (2008) menyatakan terdapat pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan sukarela, sehingga dapat dikatakan semakin

besar tingkat kepemilikan saham oleh manajer semakin tinggi pula rata-rata pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan. Wulan (2012) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib. Hal ini berarti semakin besar prosentase kepemilikan saham oleh manajer, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib yang dilakukan perusahaan. Meningkatnya kepemilikan saham perusahaan oleh manajer akan meningkatkan motivasi manajer untuk selalu meningkatkan kinerjanya. Perusahaan akan diuntungkan oleh hal ini, karena manajer akan bekerja untuk kebaikan perusahaan dan akan lebih terbuka dalam mengungkapkan informasi-informasi perusahaan guna memenuhi keinginan pemegang saham yang merupakan dirinya sendiri.

3. Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya. Hal ini untuk menghindari adanya pengaruh untuk bertindak tidak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Muh. Arief dan Bambang, 2007). Semakin besar proporsi komisaris independen dalam sebuah perusahaan, maka proses pengawasan yang dilakukan dewan komisaris semakin berkualitas dan efektif. Komisaris independen akan menuntut adanya transparansi melalui pengungkapan informasi dalam pelaporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan (Marihot dan Doddy, 2007).

Wardani (2012) menemukan bahwa proporsi komisaris independen berhubungan positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib. Hal ini berarti semakin besar proporsi komisaris independen perusahaan, semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib yang dilakukan perusahaan. Akhtaruddin, Alam Hossain, Hossain, dan Yao (2009) menyatakan terdapat hubungan positif komisaris independen terhadap pengungkapan sukarela, sehingga dapat dinyatakan semakin besar proporsi komisaris independen dalam perusahaan, semakin besar pula pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan.

Kep-305/BEJ/07-2004 telah mengatur agar perusahaan yang listed di bursa Efek Jakarta memiliki dewan komisaris independen minimal 30 persen dari jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan. Hal itu berarti bahwa dewan komisaris memiliki peran yang penting dalam perusahaan. Kriteria Komisaris Independen oleh FCGI (2001) diambil dari kriteria otoritas bursa efek Australia tentang *Outside Directors*. Kriteria tentang Komisaris Independen tersebut adalah sebagai berikut :

1. Komisaris Independen bukan merupakan anggota manajemen;
2. Komisaris Independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan;
3. Komisaris Independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam

kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menepati posisi seperti itu;

4. Komisaris Independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut;
5. Komisaris Independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut;
6. Komisaris Independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut;
7. Komisaris Independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.

4. Komite Audit

FCGI (2001) komite audit adalah komite yang dibentuk untuk membentuk dewan komisaris menjalankan tugas dan fungsinya pada suatu perusahaan. Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 menyatakan bahwa Komite Audit memiliki otoritas penuh untuk mengakses catatan, karyawan, dana, aset, dan sumber daya lain perusahaan bersama dengan auditor internal dalam

menjalankan tugasnya. FCGI (2001) menyatakan bahwa komite audit memiliki tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Komite Audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.

2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) Komite Audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*) Komite Audit bertanggungjawab untuk pengawasan perusahaan termasuk didalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

2.2.5 Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib dan Sukarela

Corporate governance dalam penelitian ini diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit. Terdapat hubungan masing-masing struktur tersebut terhadap tingkat pengungkapan baik wajib maupun sukarela.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham atas perusahaan yang dimiliki oleh institusi lain baik dari dalam maupun luar negeri. Li dan Qi (2008) menemukan pengaruh positif atas kepemilikan institusional terhadap pengungkapan sukarela, sedangkan Wulan (2012) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib. Semakin besar kepemilikan institusional dalam perusahaan, maka semakin besar tingkat pengungkapan wajib dan sukarela yang diungkapkan oleh perusahaan.

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham atas perusahaan yang dimiliki manajemen perusahaan. Li dan Qi (2008) menyatakan terdapat pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan sukarela, sedangkan Wulan (2012) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan, maka semakin besar tingkat pengungkapan wajib dan sukarela yang dilakukan perusahaan

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi maupun memiliki hubungan istimewa dengan pihak internal perusahaan. Wardani (2012) menemukan bahwa proporsi komisaris independen berhubungan positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib, sedangkan Akhtaruddin, Alam Hossain, Hossain, dan Yao (2009) menyatakan terdapat hubungan positif komisaris independen terhadap pengungkapan sukarela. Semakin besar proporsi komisaris independen dalam perusahaan, maka semakin tingkat pengungkapan wajib dan sukarela yang dilakukan perusahaan.

Komite audit adalah komite yang dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Anggita (2014) menemukan bahwa komite audit berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan wajib, sedangkan Akhtaruddin, Alam Hossain, Hossain, dan Yao (2009) menyatakan terdapat hubungan negatif antara komisaris independen terhadap pengungkapan sukarela. Terdapat perbedaan hasil dari kedua penelitian tersebut, namun dalam penelitian ini diharapkan semakin besar proporsi komite audit dalam perusahaan semakin besar tingkat pengungkapan wajib dan sukarela yang dilakukan perusahaan.

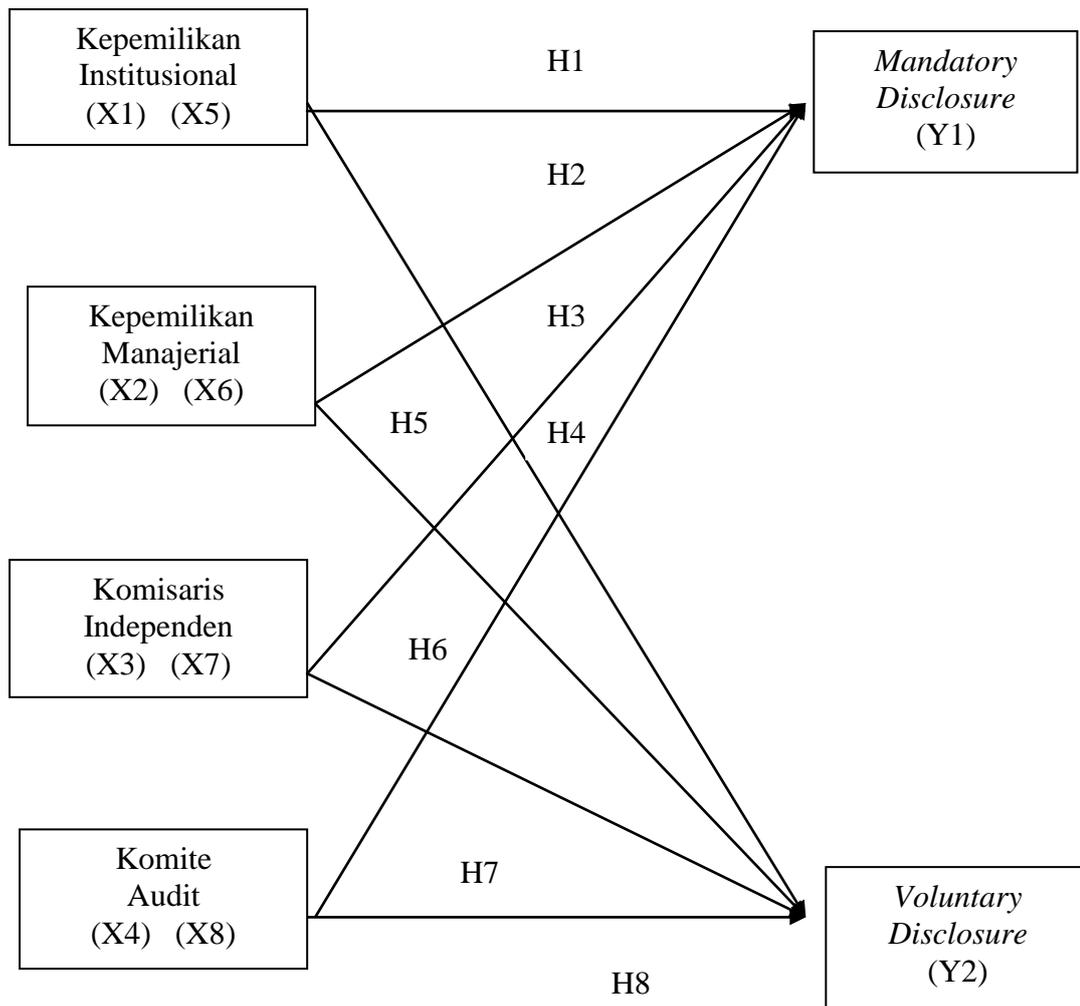
2.3 Kerangka Pemikiran

Adopsi peraturan yang konvergen dengan IFRS tidak dapat menjamin perusahaan melakukan pengungkapan yang lebih tinggi, sehingga perusahaan memerlukan sistem institusional yaitu *corporate governance*. *Corporate governance* merupakan alat untuk memonitor manajer dan mengelola perusahaan untuk menjamin bahwa perusahaan mengungkapkan informasi yang memadai (Akhtaruddin et al., 2009 dalam Wardani, 2012). *Corporate governance* mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja perusahaan, dimana hasil kinerja perusahaan ini tertuang dalam pengungkapan perusahaan (Mintara, 2008 dalam Wardani, 2012). Penerapan *corporate governance* yang baik dalam perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan informasi wajib maupun sukarela dalam laporan keuangan, sehingga informasi dalam laporan keuangan dapat berguna bagi investor dan *stakeholder* nya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan bagan kerangka pemikiran mengenai pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit terhadap tingkat pengungkapan wajib dan sukarela sebagai berikut :

Variabel Independen :

Variabel Dependen :



Sumber : diolah

Gambar 2.3
KERANGKA PEMIKIRAN

2.4 Hipotesis Penelitian

H1: Ada pengaruh kepemilikan institusional terhadap tingkat pengungkapan wajib.

H2: Ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tingkat pengungkapan wajib

H3: Ada pengaruh dewan komisaris independen terhadap tingkat pengungkapan wajib

H4: Ada pengaruh komite audit terhadap tingkat pengungkapan wajib

H5: Ada pengaruh kepemilikan institusional terhadap tingkat pengungkapan sukarela

H6: Ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tingkat pengungkapan sukarela

H7: Ada pengaruh dewan komisaris independen terhadap tingkat pengungkapan sukarela

H8: Ada pengaruh komite audit terhadap tingkat pengungkapan sukarela

